

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor kelapa sawit di Indonesia kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan, juga memberikan devisa yang cukup besar. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) Sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia, industri kelapa sawit mendorong pertumbuhan domestik bruto pertanian dan perkebunan sebesar 1,69% pada Triwulan III-2024 menurut data Badan Pusat Statistik. Menurut data kementerian perdagangan dari sisi ekspor, ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD181,14 Milyar, dengan ekspor minyak dan nabati mencapai USD14,42 Milyar termasuk minyak kelapa sawit. Data tersebut mengukuhkan peran-peran strategis industri kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Meskipun demikian, industri kelapa sawit menghadapi sorotan tajam terkait dengan isu lingkungan dan sosial (Fatimah, Setiawan, & Ramadhani, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, laporan kementerian dan lingkungan hidup dan kehutanan 2024 mencatat pembukaan 37.483 hektar hutan di area konsesi sawit. Selain memicu emisi gas rumah kaca dan polusi udara, kebakaran lahan juga menimbulkan 2.723 titik panas yang teridentifikasi.

Aktivitas industri kelapa sawit membuka kemungkinan timbulnya tantangan sosial serta gangguan terhadap lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem karena pembukaan lahan, mengurangi keanekaragaman hayati, menimbulkan pencemaran udara dan air karena kegiatan operasional perusahaan, sehingga berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat. Banyak perusahaan yang masih cenderung mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan dalam laporan mereka, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan (Mohammed *et al.*, 2024)

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Pasal 74 mewajibkan perusahaan yang mengelola atau mengelola sumber daya alam untuk terlibat dalam inisiatif CSR. Namun, data dari Badan Pelaporan Keberlanjutan Nasional (BPK) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara industri (Sari *et al.*, 2024)

Menurut Mumbunan & Juliana (2023) laporan keberlanjutan menggambarkan kinerja keberlanjutan suatu perusahaan, termasuk upaya untuk menangani kewajiban ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Laporan keberlanjutan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang pengaruh kegiatan operasional suatu organisasi terhadap ketiga area ini. Laporan ini juga mencakup informasi tentang visi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta kebijakan dan inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Sustainability report semakin krusial, sejalan dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Pada level internasional, IFRS menanggapi hal tersebut dengan membentuk laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, Indonesia juga menyelaraskan standar akuntansi nasional menuju standar IFRS. Di Indonesia standar pelaporan pengungkapan keberlanjutan yang digunakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51 (POJK 51) dan *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk kerangka kerja yang konsisten dan menyeluruh.

Dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) aspek ekonomi berperan sebagai dasar dalam mendukung tercapainya kinerja aspek sosial dan lingkungan (Avilya & Ghozali, 2022). Apabila perusahaan dapat meraih ekonomi yang maksimal maka perusahaan akan memiliki lebih banyak dana untuk dialokasikan dengan kepentingan dan program sosial dan lingkungan. Dan sebaliknya jika hasil ekonomi kurang maksimal dalam aspek ekonomi, maka program sosial dan lingkungan akan kurang maksimal yang mengakibatkan laporan keberlanjutan tidak dapat konsisten yang mempengaruhi reputasi perusahaan (Ngadi & Mita Noveria, 2017).

Reputasi perusahaan merupakan aset yang tidak berwujud yang digunakan untuk menarik para pemangku kepentingan seperti investor, klien dan karyawan (Agustina, Nurmalasari, & Astuty, 2023). Perusahaan yang memiliki citra positif umumnya mampu bersaing lebih efektif di pasar karena memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan, sehingga berpengaruh positif terhadap pergerakan harga saham. Namun, apabila reputasi perusahaan menurun, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan serta menekan nilai saham di pasar. Dalam penelitian yang dilakukan Shenurti, Erawati, & Nur Kholifah (2022) mempelajari penggunaan pelaporan keberlanjutan dengan membandingkan kinerja menggunakan rasio ROA dan ROE dengan reputasi bisnis. Namun, tolak ukur ROA dan ROE cenderung menekankan kesuksesan jangka pendek. Dalam penelitian ini, reputasi perusahaan dinilai menggunakan rasio harga terhadap nilai buku, yang dianggap lebih mencerminkan reputasi jangka panjang perusahaan.

Rasio harga pasar saham terhadap nilai buku membandingkan harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham. Rasio ini menunjukkan jumlah yang bersedia dibayarkan investor per unit nilai buku perusahaan. Anjeliana (2024) menyatakan bahwa rasio PBV yang tinggi mencerminkan pandangan optimis investor terhadap kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya pada periode mendatang. Oleh karena itu, *price to book value* menjadi tolak ukur yang cocok untuk aset tidak berwujud seperti reputasi perusahaan (Agustina, Nurmalasari, & Astuty, 2023)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana item pengungkapan aspek ekonomi pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh item pengungkapan aspek ekonomi terhadap reputasi perusahaan yang diukur dari *Price to Book Value Ratio* pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengungkapan laporan *Sustainability Report* aspek ekonomi pada perusahaan kelapa sawit di terdaftar di GAPKI
2. Untuk menganalisis pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh terhadap reputasi perusahaan yang diukur dengan *Price to book value Ratio* pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di GAPKI.

1.4. Kontribusi/Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara positif bagi peneliti, organisasi, dan peneliti di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan keberlanjutan dalam industri perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
2. Mampu menerapkan hasil pembelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dan menyelesaikan salah satu syarat perkuliahan dengan tepat waktu di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menyusun dan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan (*sustainability report*) khususnya dalam aspek ekonomi.
4. Menjadi salah satu dasar kajian bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan *sustainability report* khususnya aspek ekonomi dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.